

KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA *REVENGE PORN* DITINJAU DARI HAK UNTUK MENGHILANGKAN JEJAK DIGITAL

Zaskia Meitha Kaunang¹, Ariesta Wibisono Anditya²

INTISARI

Revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang marak terjadi di ruang digital. Meskipun pelaku sering dijatuhi hukuman dalam perkara ini, hak korban untuk menghapus konten yang merugikan mereka (*Right to Be Forgotten*) sering kali tidak diakomodasi dengan baik dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan hak untuk dilupakan dalam perkara *revenge porn* dan bagaimana hukum di Indonesia menjamin hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan, antara lain Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn dan 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *revenge porn* telah diadili, perintah penghapusan jejak digital hampir tidak pernah dicantumkan dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan peran aparat penegak hukum serta sinergi dengan platform digital agar hak korban dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Right to Be Forgotten, Revenge Porn, Jejak Digital, Putusan Pengadilan*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**A JUDICIAL OF
REVENGE PORN VERDICTS IN THE
CONTEXT OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN**

Zaskia Meitha Kaunang¹, Ariesta Wibisono Anditya²

ABSTRACT

Revenge porn is a form of gender-based digital sexual violence. Although perpetrators are often convicted, victims' rights to erase harmful content (Right to Be Forgotten) are rarely enforced in court practice. This research analyzes how the judiciary applies this right in revenge porn cases and how Indonesian law protects the victims. Using normative legal methods and statute, conceptual, and case approaches, this study reviews court rulings such as Decision No. 77/Pid.Sus/2024/PN Smn and 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Findings reveal that court decisions seldom include digital content deletion orders, creating a gap between law and practice. Regulatory harmonization and stronger law enforcement are needed, alongside cooperation with digital platforms, to ensure full victim protection.

Keywords: Right to Be Forgotten, Revenge Porn, Digital Trace, Court Decisions

¹ Student of Bachelor of Law Program General Achmad Yani University of Yogyakarta

² Lecturer of Bachelor of Law Program General Achmad Yani University of Yogyakarta